

**PENGARUH ANTARA KEPEMILIKAN
KELUARGA DAN *CORPORATE GOVERNANCE*
TERHADAP TINDAKAN PAJAK AGRESIF**



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1)
pada Program Sarjana Fakultas Ekonomika dan Bisnis
Universitas Diponegoro

Disusun oleh :

ALFIYANI NUR HIDAYANTI
NIM. C2C009187

FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS
UNIVERSITAS DIPONEGORO
2013

PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Penyusun : Alfiyani Nur Hidayanti
Nomor Induk Mahasiswa : C2C009187
Fakultas/ Jurusan : Ekonomika dan Bisnis/ Akuntansi
Judul Skripsi : **PENGARUH ANTARA
KEPEMILIKAN KELUARGA
DAN *CORPORATE*
GOVERNANCE TERHADAP
TINDAKAN PAJAK AGRESIF**
Dosen Pembimbing : Herry Laksito, S.E., M.Adv. Acc., Akt.

Semarang, 27 Februari 2013

Dosen Pembimbing,

(Herry Laksito, S.E., M.Adv. Acc., Akt.)
NIP. 19690506 199903 1002

PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN

Nama : Alfiyani Nur Hidayanti
Nomor Induk Mahasiswa : C2C009187
Fakultas/ jurusan : Ekonomika dan Bisnis / Akuntansi
Judul Skripsi : **PENGARUH ANTARA
KEPEMILIKAN KELUARGA DAN
CORPORATE GOVERNANCE
TERHADAP TINDAKAN PAJAK
AGRESIF.**

Telah dinyatakan lulus ujian pada tanggal 21 Maret 2013

Tim Penguji:

1. Herry Laksito, S.E., M.Adv. Acc., Akt. (.....)
2. Wahyu Meiranto, S.E., M.Si., Akt (.....)
3. Fuad, S.E.T., M.Si., Ph.D. (.....)

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini saya, Alfiyani Nur Hidayanti, menyatakan bahwa skripsi dengan judul : **Pengaruh antara Kepemilikan Keluarga dan *Corporate Governance* terhadap Tindakan Pajak Agresif**, adalah hasil tulisan saya sendiri. Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau symbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari orang lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan/atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan penulis aslinya.

Apabila saya melakukan tindakan yang bertentangan dengan hal tersebut diatas, baik disengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijazah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.

Semarang, 27 Februari 2013

Yang membuat pernyataan

Alfiyani Nur Hidayanti

NIM : C2C009187

ABSTRACT

This study aims to analyze and provide empirical evidence of influence between family ownership and corporate governance for aggressive action. The hypothesis (1) family ownership affect aggressive tax measures, (2) corporate governance affects aggressive taxation.

The population in this study is a manufacturing company listed on the Stock Exchange 2008-2011. Data was collected using purposive sampling method for manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange. Data were analyzed using regression analysis.

The results of this study indicate that family ownership has no significant effect on aggressive tax measures. While corporate governance has a significant effect on aggressive tax measures as measured by cash effective tax rate (CETR).

Keywords: Family Ownership, Corporate governance, tax aggressiveness.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan memberikan bukti empiris pengaruh antara kepemilikan keluarga dan *corporate governance* terhadap tindakan agresif. Hipotesis yang diajukan (1) kepemilikan keluarga berpengaruh terhadap tindakan pajak agresif, (2) *corporate governance* berpengaruh terhadap tindakan pajak agresif.

Populasi pada penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI 2008-2011. Data dikumpulkan dengan menggunakan metode *purposive sampling* terhadap perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Data penelitian dianalisa dengan analisis regresi.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kepemilikan keluarga tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tindakan pajak agresif. Sedangkan *corporate governance* memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tindakan pajak agresif yang diukur dengan *cash effective tax rate (CETR)*.

Kata kunci : Kepemilikan keluarga, *Corporate governance*, Tindakan pajak agresif.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **PENGARUH ANTARA KEPEMILIKAN KELUARGA DAN CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP TINDAKAN PAJAK AGRESIF**. Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi sebagian dari persyaratan untuk menyelesaikan studi sarjana S-1 Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Diponegoro Semarang.

Dalam proses menyelesaikan skripsi ini banyak sekali hambatan-hambatan yang dialami penulis. Akan tetapi hambatan-hambatan tersebut seakan tidak ada artinya ketika penulis mendapatkan bimbingan, semangat, motivasi serta arahan dari dosen pembimbing, keluarga, pacar serta teman-teman hingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini dengan ketulusan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Kedua orang tua penulis, Ayah (H. Darwinto) dan Ibu (Hj. Kadarwati) yang senantiasa mendo'akan, memberikan motivasi, semangat serta kasih sayang kepada penulis hingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini. Semoga penulis selalu dapat menjadi anak yang terbaik dan berbakti kepada orang tua, serta selalu dapat membanggakan orang tua.
2. Bapak Prof. Mohamad Nasir, Msi, Ph.D, Akt selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang yang saya hormati dan saya banggakan.

3. Bapak Prof. Dr. Much. Syafrudin, Msi., Akt. selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro.
4. Bapak Herry Laksito, SE., M.Adv. Acc., Akt. selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu dalam membimbing dan memberikan dukungan serta motivasi kepada penulis sehingga penulis selalu merasa bersemangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Ibu Andri Prastiwi, S.E., M.Si., Akt. selaku Dosen Wali yang telah memberikan perhatian dan bimbingan selama penulis menjalani proses belajar di Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro.
6. Seluruh staf pengajar, Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro yang telah memberikan bekal ilmu yang sangat bermanfaat bagi penulis.
7. Muhammad Jauhan Irfana Fataharaya, seseorang yang selalu berada disamping penulis selama penulis menyelesaikan skripsi. Terima kasih atas semangat yang selalu diberikan kepada penulis, do'a yang selalu dipanjatkan buat penulis, serta kasih sayang yang diberikan kepada penulis. Terima kasih guru, sahabat, teman, serta calon pemimpinku. Terima kasih !!
8. Adik-adikku, Lukman Hidayat dan Annas Bachtiar. Terima kasih atas kasih sayang, support dan do'a dari kalian.
9. Keluarga penulis, Pakdhe/Budhe, Paklik/Bulik, ela, is, in, dwi, suska, mbak umi, mas sandi, mas bowo, mbak ita, mbak war, mas nada, febri. Terima kasih atas support dan do'a dari kalian.

10. Sahabat penulis “Sailormoon”: Pritta Amina Putri, Ardina Nuresa, Hanny Larasati, Kurnia Putri Pratiwi, Riske Meitha Anggraheni, Martantya Maudy Rahmanti, Pradesta Ariningtika. Terima kasih atas kasih sayang, support, do’a dan pengalaman selama penulis berada di Semarang. Kalian sahabat terbaik.
11. Teman-teman dan sahabat penulis: Mayang, Dina, Sara, Ratna Dewi, Lita, Vita, Eka, Tika, Dewi, Mus, Awwin, Abel, Mas Daniel, Mas bambang, Mbak Harvita, Tomy.
12. Keluarga besar Akuntansi Reguler 2 angkatan 2009 yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas pengalaman suka maupun duka, support, kasih sayang dan do’a yang kalian berikan kepada penulis. Kalian teman-teman yang hebat !
13. Teman-teman KKN Desa Siguci, Kecamatan Pecalungan, Kabupaten Batang. Astri, Icha, Muna, Ita, Innue, Sisi, Oji, Alvin, Reza, Ervan, Dares, Ocky, Oki, Huda, Denny. 35 hari bersama kalian banyak pelajaran dan hikmah yang bisa penulis ambil. Terimakasih.
14. Semua pihak yang telah memberi semangat dan doa sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun demi penulisan yang lebih baik di masa mendatang. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Semarang, 27 Februari 2013

Alfiyani Nur Hidayanti

NIM: C2C009187

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

***Ketika hendak melakukan sesuatu, mintalah restu kedua orang tua, karena
ridho Allah SWT terletak pada ridho orang tua.***

(Jauhan Irfana)

***man jadda wajada man shabara zhafira
“ barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan berhasil dan
barang siapa yang bersabar pasti akan beruntung “***

(Peribahasa Arab)

SKRIPSI INI DIPERSEMBAHKAN UNTUK

- Ayah (H. Darwinto) & Ibu (Hj. Kadarwati)
- Annas & Lukman
- Muhammad Jauhan Irfana Fataharaya
- Sahabat & teman-Temanku

DAFTAR ISI

JUDUL	i
PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iv
<i>ABSTRACT</i>	v
ABSTRAKS	vi
KATA PENGANTAR	x
MOTO DAN PERSEMBAHAN	xi
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL.....	xvi
DAFTAR GAMBAR	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan dan Manfaat	6
1.3.1 Tujuan Penelitian	6
1.3.2 Manfaat Penelitian	6
1.3.2.1 Manfaat Teoritis	6
1.3.2.2 Manfaat Praktis	7
1.4 Sistematika Penulisan	8

BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Landasan Teori dan Hipotesis.....	9
2.1.1 Teori Agensi	9
2.1.2 Tindakan Pajak Agresif	12
2.1.3 Keuntungan dan Kerugian Tindakan Pajak Agresif	13
2.1.4 Kepemilikan Keluarga	14
2.1.5 <i>Corporate Governance</i>	17
2.1.6 Pengertian <i>Corporate Governance</i>	18
2.1.7 Prinsip-prinsip <i>Corporate Governance</i>	20
2.1.8 Manfaat <i>Corporate Governance</i>	22
2.1.9 Variabel Kontrol	24
2.2 Penelitian Terdahulu	25
2.3 Kerangka Teoritis	27
2.4 Pengembangan Hipotesis	28
2.4.1 Hipotesis 1	28
2.4.2 Hipotesis 2	29
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	32
3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel	32
3.1.1 Variabel Dependen	32
3.1.2 Definisi Independen	33
3.1.2.1 Kepemilikan Keluarga	34
3.1.2.2 <i>Corporate Governance</i>	34
3.1.3 Variabel Kontrol	34

3.2 Populasi dan Sampel	35
3.3 Jenis dan Sumber Data	36
3.4 Metode Pengumpulan Data	36
3.5 Metode Analisis Data	37
3.5.1 Analisis Regresi	37
3.5.2 Uji Asumsi Klasik	39
3.5.2.1 Uji Normalitas	39
3.5.2.2 Uji Multikolonieritas	40
3.5.2.3 Uji Autokorelasi	41
3.5.2.4 Uji Heteroskedastisitas	41
3.5.3 Analisis Statistik Deskriptif	41
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	42
4.1 Deskripsi Variabel	42
4.2 Hasil Analisis	45
4.2.1 Uji Asumsi Klasik	45
4.2.2 Analisis Regresi	49
4.2.2.1 Uji Model (Uji F)	50
4.2.2.2 Koefisien Determinasi	50
4.2.3 Pengujian Hipotesis	52
4.3 Interpretasi Hasil	55
4.3.1 Hipotesis 1	56
4.3.2 Hipotesis 2	57
4.3.4 Variabel kontrol	58

BAB V PENUTUP	59
5.1 Kesimpulan	59
5.2 Keterbatasan	60
5.3 Saran	60

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	26
Tabel 4.1 Perincian Sampel Penelitian	42
Tabel 4.2 Statistik Deskriptif	43
Tabel 4.4 Uji Normalitas Awal	46
Tabel 4.5 Uji Normalitas Awal Setelah Mengeluarka Outlier	47
Tabel 4.6 Uji Multikolinieritas	48
Tabel 4.7 Uji Autokorelasi	48
Tabel 4.8 Uji Heteroskedastisitas	49
Tabel 4.9 Rekapitulasi Hasil Regresi	50
Tabel 4.10 Ringkasan Pengujian Hipotesis	55

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran Teoritis	27
--	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran A Daftar Perusahaan Sampel	64
Lampran B Hasil Analisis	70

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak penghasilan yang disetorkan perusahaan kepada negara merupakan proses transfer kekayaan dari pihak perusahaan (khususnya pemilik) kepada negara, sehingga dapat dikatakan pembayaran pajak penghasilan ini merupakan biaya bagi perusahaan dan pemilik perusahaan. Oleh karenanya pemilik perusahaan diduga akan cenderung lebih suka manajemen perusahaan melakukan tindakan pajak agresif (Sari dan Martani, 2010).

Tindakan pajak agresif adalah suatu tindakan yang ditujukan untuk menurunkan laba kena pajak melalui perencanaan pajak baik menggunakan cara yang tergolong atau tidak tergolong *tax evasion* (Sari dan Martani, 2009). *Tax evasion* merupakan hambatan-hambatan yang terjadi dalam pemungutan pajak sehingga mengakibatkan berkurangnya penerimaan kas negara. Dalam penelitian ini, tindakan pajak agresif mempunyai lima komponen pengukuran, yaitu *effective tax rate (ETR)*, *cash effective tax rate (CETR)*, *book-tax difference Manzon-Plesko (BTD_MP)*, *book-tax difference Desai-Dharmapala (BTD_DD)* dan *tax planning (TAXPLAN)*. *ETR* digunakan karena dianggap dapat merefleksikan perbedaan tetap antara perhitungan laba buku dengan laba fiskal (Frank et al.

2009). Sedangkan *CETR* digunakan karena diharapkan dapat mengidentifikasi keagresifan perencanaan pajak suatu perusahaan (Chen et al.2010). Untuk mendapatkan trigulasi, tiga jenis *book-tax difference* digunakan, yaitu *book-tax difference Manzon-Plesko (BTD_MP)*, *book-tax difference Desai-Dharmapala (BTD_DD)* dan *tax planning (TAXPLAN)*. *Book-tax difference* bisa timbul karena adanya aktivitas perencanaan pajak dan manajemen laba didalam perusahaan, maka nilai residu dari regresi nilai *book-tax difference* dan nilai total akrual diharapkan murni merupakan cerminan dari aktivitas perencanaan pajak (Desai dan Dharmapala. 2006). Sedangkan *tax planning* digunakan karena dianggap dapat menggambarkan tingkat subsidi pajak yang digunakan didalam suatu perusahaan (Yin dan Cheng 2004). Dari kelima ukuran tersebut diharapkan tindakan pajak agresif dapat diidentifikasi, dan dapat diketahui apakah suatu perusahaan melakukan suatu tindakan pajak agresif apa tidak. Walaupun tidak semua tindakan yang dilakukan perusahaan melanggar peraturan, namun semakin banyak celah yang digunakan perusahaan, maka perusahaan tersebut dianggap semakin agresif.

Adanya argumen yang menyatakan bahwa pajak merupakan biaya bagi perusahaan dan pemilik perusahaan, tidak serta merta membuat perusahaan melakukan tindakan pajak agresif. Hal ini dikarenakan tindakan pajak agresif dapat menimbulkan konsekuensi biaya lain, yaitu biaya akibat dari masalah yang timbul akibat adanya masalah keagenan (*agency problem*). Selain itu, mendirikan perusahaan keluarga juga menyiratkan konflik keagenan yang lebih besar antara pemegang saham besar dan minoritas, dan konflik keagenan yang lebih kecil

antara pemilik dan manajer. sifat dan tingkat konflik keagenan dapat mempengaruhi tingkat pajak agresif (Sari dan Martani. 2010).

Masalah keagenan dalam perusahaan tidak selalu sama tingkatannya. Menurut (Sari dan Martani. 2010) perbandingan tingkat keagresifan pajak perusahaan keluarga dengan perusahaan non-keluarga tergantung dari seberapa besar efek manfaat atau biaya yang timbul dari tindakan pajak agresif tersebut terhadap pemilik perusahaan yang berasal dari keluarga pendiri (*family owners*), atau efek yang diterima manajer dalam perusahaan non-keluarga. Hasil penelitian (Chen et al. 2010) menunjukkan bahwa ternyata tingkat keagresifan pajak perusahaan keluarga lebih kecil daripada perusahaan non-keluarga. Hal ini terjadi karena diduga *family owners* lebih rela membayar pajak lebih tinggi, daripada harus membayar denda pajak dan menghadapi kemungkinan rusaknya reputasi perusahaan akibat audit dari fiskus pajak. Fiskus pajak merupakan petugas pemeriksa pajak.

Perusahaan non-keluarga memiliki tingkat keagresifan pajak yang lebih tinggi daripada perusahaan keluarga, diduga terjadi karena masalah keagenan lebih besar terjadi pada perusahaan non-keluarga (Chen et al. 2010). Saat kepemilikan dan manajemen terpisah, terjadilah proses kontrak kerja dan pengawasan yang tidak sempurna. Ketidaksempurnaan ini menimbulkan suatu kesempatan bagi manajer untuk melakukan tindakan yang oportunistik, sehingga menimbulkan masalah *corporate governance* (Sari dan Martani. 2007).

Literatur yang luas tentang bagaimana pajak mempengaruhi pengambilan keputusan perusahaan keuangan, seperti terakhir di (Graham. 2003), telah

mempertimbangkan pengaruh pajak atas pilihan pembiayaan, organisasi bentuk dan keputusan restrukturisasi, kebijakan pembayaran, kebijakan kompensasi dan risiko keputusan manajemen. Dalam literatur ini, pajak dipandang sebagai salah satu faktor yang membentuk keputusan ini. Hubungan antara pajak dengan *corporate governance* telah banyak dikaji oleh beberapa peneliti, antara lain penelitian yang dilakukan oleh (Desai dan Dharmapala. 2006). Menurut (Desai dan Dharmapala. 2006) hubungan antara kompensasi insentif dengan tindakan penghindaran pajak bersifat negatif. Hubungan negatif ini lebih banyak terjadi pada perusahaan-perusahaan yang memiliki tingkat *corporate governance* rendah, yang dalam pengelolaan perusahaan sifat oportunistik manajer diduga merupakan faktor yang dominan.

Telah ada beberapa penelitian yang mengkaji mengenai pengaruh dari faktor kepemilikan keluarga dan praktik *corporate governance* di Indonesia (Hermawan, 2009). Namun berdasarkan telaah literatur yang dilakukan, belum ditemukan penelitian yang mengkaji secara komprehensif pengaruh kepemilikan keluarga dan praktik *corporate governance* terhadap tindakan pajak agresif.

Untuk mengontrol kemungkinan adanya pengaruh dari profitabilitas dan *leverage* perusahaan, maka penelitian ini memasukkan variabel kontrol *return on assets (ROA)* dan *leverage (LEV)* kedalam model regresi yang diuji. Variabel *PPE* juga dikontrol karena adanya metode penyusutan untuk pelaporan komersil dan fiskal (Manzon dan Plesko 2002). Menurut Richardson dan Lanis (2007), semakin besar perusahaan maka akan semakin rendah *ETR* yang dimilikinya, hal ini disebabkan perusahaan mampu menggunakan sumber daya yang dimilikinya

untuk membuat suatu perencanaan pajak yang baik. Namun perusahaan tidak selalu dapat menggunakan *power* yang dimilikinya untuk melakukan perencanaan pajak, karena adanya batasan berupa kemungkinan menjadi sorotan dan sasaran dari keputusan regulator, oleh karena itu ukuran perusahaan (*SIZE*) dikontrol (Watts dan Zimmerman 1986).

Di sisi lain, tingkat pertumbuhan usaha perusahaan (diproksikan dengan *market-to-book ratio – MB*) juga dikontrol karena Manzon dan Plesko (2002) menyatakan bahwa perusahaan yang sedang mengalami pertumbuhan akan lebih suka melakukan investasi pada *tax-favored assets*. Perusahaan yang sedang mengalami pertumbuhan dapat leluasa memilih jenis investasinya, namun tidak demikian dengan perusahaan yang dananya terbatas. Dan untuk menghindari adanya pengaruh dari kondisi bisnis terhadap kecenderungan perilaku investasi yang dilakukan perusahaan, penelitian ini mengontrol *lagged book-tax difference* (nilai *book-tax difference* tahun $t-1$)

Oleh karenanya maka penelitian ini ingin menguji bagaimana pengaruh kepemilikan keluarga dan praktik *corporate governance* terhadap tindakan pajak agresif perusahaan di Indonesia. Lebih spesifiknya akan dilihat pengaruh dari adanya praktik *corporate governance* yang baik terhadap hubungan karakteristik kepemilikan perusahaan dengan tindakan pajak agresif.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, menunjukkan bahwa tindakan pajak agresif bisa dilakukan oleh setiap perusahaan tergantung dari tata kelola perusahaan itu sendiri. Maka penelitian ini bermaksud untuk melihat faktor-faktor

yang diduga mempengaruhi tindakan pajak agresif pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Berdasarkan uraian diatas, maka masalah penelitian ini dirumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Apakah kepemilikan keluarga berpengaruh terhadap tindakan pajak agresif?
2. Apakah *corporate governance* berpengaruh terhadap tindakan pajak agresif perusahaan?

1.3 Tujuan dan Manfaat penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis hubungan antara kepemilikan keluarga terhadap tindakan pajak agresif.
2. Untuk menganalisis hubungan antara *corporate governance* terhadap tindakan pajak agresif.

1.3.2 Manfaat Penelitian

1.3.2.1 Manfaat Teoritis

1. Manfaat bagi pengembangan praktek agar pemilik dan pengelola perusahaan dapat mengetahui pentingnya pengawasan mekanisme *corporate governance*.
2. Agar pemilik dan pengelola perusahaan mengetahui tanggung jawab apa saja yang harus diperhatikan dalam menjalankan perusahaan.
3. Memberikan kesadaran kepada pemilik perusahaan agar membayar pajak sesuai dengan jumlah yang harus dibayarkan.

4. Memberikan masukan pada pemilik perusahaan dan manajer perusahaan agar menjalankan perusahaan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh perusahaan.
5. Memberikan pemahaman tentang prinsip dasar *corporate governance* yang terdiri dari *Transparency, Accountability and Responsibility, Responsiveness, Independency, dan Fairness* kepada pemilik dan manajer perusahaan.
6. Dapat memberikan masukan kepada perusahaan mengenai faktor-faktor penting dalam penerapan *good corporate governance* serta membantu untuk lebih fokus dalam melakukan pengawasan perusahaan sehingga dapat mencegah terjadinya praktik *corporate governance* yang buruk.
7. Memberikan masukan kepada investor dalam menilai dan mengevaluasi *corporate governance* dalam suatu perusahaan ketika akan melakukan penanaman modal dalam perusahaan tersebut.

1.3.2.2 Manfaat Praktis

1. Bagi pengembangan pengetahuan akuntansi dan perpajakan dapat memberikan kontribusi dalam penelitian sejenis atau dapat dijadikan sebagai kajian teori dan referensi.

a. Sistematika Penulisan

Penelitian ini menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TELAAH PUSTAKA

Bab ini menjelaskan tentang landasan teori yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan, kemudian dilanjutkan dengan penelitian terdahulu dan kerangka pemikiran teoritis.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang variabel penelitian dan definisi operasional variabel, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data dan metode analisis.

BAB IV HASIL DAN ANALISIS

Bab ini menjelaskan tentang deskripsi objek penelitian, analisis data dan interpretasi hasil.

BAB V PENUTUP

Bab ini adalah bab terakhir sekaligus menjadi penutup dari skripsi ini. Bab ini berisi kesimpulan dari hasil dan pembahasan penelitian, keterbatasan penelitian, keterbatasan dan saran-saran terhadap pengembangan teori dan aplikasi.

BAB II

TELAAH PUSTAKA

2.1 Landasan Teori dan Hipotesis

2.1.1 Teori Agensi

Menurut Kim, Nofsinger, dan Mohr (2010) pada umumnya terdapat pemisahan antara pemilik perusahaan dengan manajemen yang akan mempengaruhi pertumbuhan dari bisnis suatu perusahaan. Agar bisnis berjalan sesuai dengan yang diharapkan maka para pemilik perusahaan atau pemegang saham akan mempekerjakan manajer yang menjadi bagian dari suatu manajemen untuk menjalankan bisnis tersebut. Adanya pemisahan kepemilikan antara pemilik perusahaan dengan manajemen yang menjalankan perusahaan ternyata menimbulkan konflik di dalam perusahaan. Konflik ini biasanya muncul karena kedua pihak akan berpikir untuk memenuhi kepentingan masing-masing. Pemegang saham akan fokus pada peningkatan nilai sahamnya sedangkan manajer fokus pada pemenuhan kepentingan pribadi.

Adanya pihak manajemen yang dapat melakukan kecurangan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih tinggi membuat para pemilik perusahaan atau pemegang saham menjadi tidak percaya dengan setiap tindakan yang dilakukan oleh pihak manajemen. Dengan timbulnya berbagai masalah maka akan menambah konflik antara pemegang saham dengan tim manajemen yang membawa dampak buruk terhadap perusahaan. Konflik ini dikenal dengan nama *agency problem* (Kim, Nofsinger, dan Mohr, 2010).

Masalah agensi tidak hanya terjadi antara prinsipal dan manajemen, tetapi juga dapat terjadi antara pemegang saham besar (mayoritas) dan pemegang saham minoritas. Jika ada kepemilikan saham minoritas dalam perusahaan, maka akan timbul masalah agensi baru, yaitu adanya konflik antara pemilik saham mayoritas dengan pemilik saham minoritas (arifin, 2003).

Masalah agensi juga menyangkut hubungan kontraktual antara anggota-anggota di perusahaan. Jensen dan Meckling (1976) menjelaskan bahwa hubungan agensi terjadi ketika satu orang atau lebih (*principal*) mempekerjakan orang lain (*agent*) untuk memberikan suatu jasa dan kemudian mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan. *Principal* merupakan pemegang saham atau investor, sedangkan *agent* merupakan manajemen yang mengelola perusahaan. Inti dari hubungan keagenan adalah adanya pemisahan fungsi antara kepemilikan di investor dan pengendalian di pihak manajemen.

Kepentingan ini terus meningkat karena pihak *principal* tidak dapat memonitor aktivitas *agent* sehari-hari untuk memastikan bahwa *agent* bekerja sesuai dengan keinginan para pemegang saham. Sebaliknya, *agent* sendiri memiliki lebih banyak informasi penting mengenai kapasitas diri, lingkungan kerja, dan perusahaan secara keseluruhan. Hal tersebut memicu timbulnya ketidakseimbangan informasi antara *principal* dan *agent*. Kondisi ini dinamakan dengan asimetri informasi. Adanya asimetri informasi tersebut dapat mendorong agen untuk menyembunyikan beberapa informasi yang tidak diketahui prinsipal untuk memaksimalkan keuntungan bagi agen. Agen dapat termotivasi untuk

melaporkan informasi yang tidak sebenarnya kepada prinsipal, terutama jika informasi tersebut berkaitan dengan pengukuran kinerja agen (Ujiantho, 2007).

Menurut Gitman (2007) *agency problem* adalah masalah yang timbul akibat tindakan manajer yang lebih mengutamakan pemenuhan tujuan pribadinya bila dibandingkan dengan tujuan perusahaan. Untuk mengatasi atau me-minimize masalah agensi tersebut maka dapat dilakukan dengan dua cara, sebagai berikut:

1. *Market Forces*

Market forces merupakan pemegang saham yang memiliki saham mayoritas, seperti investor institusional yang biasanya berupa perusahaan asuransi jiwa, mutual fund, perusahaan dana pensiun. Melalui hak suara mayoritas maka diyakini akan dapat mengatasi masalah agensi. Hal tersebut dilakukan dengan cara memberi tekanan kepada manajer untuk bekerja dengan lebih baik ataupun mengganti manajemen yang dianggap tidak dapat memenuhi kesejahteraan pemegang saham atau pemilik perusahaan. Hal lain yang dapat dilakukan adalah mengancam dengan mengatakan perusahaan lain akan melakukan *takeover* yang dapat merestrukturisasi manajemen. Tujuan dari hal tersebut adalah menimbulkan motivasi bagi manajemen agar bertindak sesuai dengan kepentingan pemilik perusahaan.

2. *Agency Cost*

Agency cost merupakan biaya yang akan dikeluarkan untuk mengurangi *agency problem* sekaligus untuk pemenuhan kesejahteraan para pemegang saham. Biaya yang dikeluarkan antara lain, berasal dari biaya insentif yang akan diberikan kepada manajer untuk memaksimalkan harga saham. Selain

itu, biaya keagenan juga timbul karena adanya pengawasan terhadap setiap tindakan manajer, dimana sistem pengawasan tersebut dikenal dengan *corporate governance*.

2.1.2 Tindakan Pajak Agresif

Definisi tindakan pajak agresif dalam penelitian ini mengacu pada pengertian pajak agresif yang digunakan oleh Frank et al. (2009), yaitu suatu tindakan yang bertujuan untuk menurunkan laba kena pajak melalui perencanaan pajak baik menggunakan cara yang tergolong atau tidak tergolong *tax evasion*. *Tax evasion* merupakan hambatan-hambatan yang terjadi dalam pemungutan pajak sehingga berkurangnya penerimaan kas negara. Dalam penelitian ini, tindakan pajak agresif mempunyai lima komponen pengukuran, yaitu *effective tax rate (ETR)*, *cash effective tax rate (CETR)*, *book-tax difference Manzon-Plesko (BTD_MP)*, *book-tax difference Desai-Dharmapala (BTD_DD)* dan *tax planning (TAXPLAN)*. *ETR* digunakan karena dianggap dapat merefleksikan perbedaan tetap antara perhitungan laba buku dengan laba fiskal (Frank et al. 2009). Sedangkan *CETR* digunakan karena diharapkan dapat mengidentifikasi keagresifan perencanaan pajak suatu perusahaan (Chen et al.2010). untuk mendapatkan trigulasi, tiga jenis *book-tax difference* digunakan, yaitu *book-tax difference Manzon-Plesko (BTD_MP)*, *book-tax difference Desai-Dharmapala (BTD_DD)* dan *tax planning (TAXPLAN)*. *Book-tax difference* bisa timbul karena adanya aktivitas perencanaan pajak dan manajemen laba didalam perusahaan, maka nilai residu dari regresi nilai *book-tax difference* dan nilai total akrual diharapkan murni merupakan cerminan dari aktivitas perencanaan pajak (Desai

dan Dharmapala. 2006). Sedangkan *tax planning* digunakan karena dianggap dapat menggambarkan tingkat subsidi pajak yang digunakan didalam suatu perusahaan (Yin dan Cheng 2004). Dari kelima ukuran tersebut diharapkan tindakan pajak agresif dapat diidentifikasi, dan dapat diketahui apakah suatu perusahaan melakukan suatu tindakan pajak agresif apa tidak. Walaupun tidak semua tindakan yang dilakukan perusahaan melanggar peraturan, namun semakin banyak celah yang digunakan perusahaan, maka perusahaan tersebut dianggap semakin agresif.

Frank, Lynch, dan Rego (2006) mendefinisikan agresivitas pajak sebagai manajemen ke bawah dari kegiatan kena pajak penghasilan melalui perencanaan pajak. mengelola pajak adalah bagian penting dari pekerjaan seorang manajer, karena pajak merupakan biaya yang signifikan untuk perusahaan dan pemegang saham.

Sari dan Martani (2010) juga menyatakan suatu agresivitas pelaporan pajak adalah situasi ketika perusahaan melakukan kebijakan pajak tertentu dan suatu hari terdapat kemungkinan tindakan pajak tersebut tidak akan diaudit atau dipermasalahkan dari sisi hukum, namun tindakan ini berisiko karena ketidakjelasan posisi akhir (apakah tindakan pajak tersebut dianggap melanggar atau tidak melanggar hukum yang berlaku).

2.1.3 Keuntungan dan Kerugian dari Tindakan Pajak Agresif

Sebelum memutuskan untuk melakukan suatu tindakan pajak agresif, pembuat keputusan (manajer) akan memperhitungkan keuntungan dan kerugian dari tindakan yang akan dilakukan. Ada tiga keuntungan tindakan pajak agresif :

1. Keuntungan berupa penghematan pajak yang akan dibayarkan perusahaan kepada negara, sehingga jumlah kas yang dinikmati pemilik/pemegang saham dalam perusahaan menjadi lebih besar.
2. Keuntungan bagi manajer (baik langsung maupun tidak langsung) yang mendapatkan kompensasi dari pemilik/pemegang saham perusahaan atas tindakan pajak agresif yang dilakukannya.
3. Keuntungan bagi manajer adalah mempunyai kesempatan untuk melakukan *rent extraction* (Chen et al. 2010).

Sedangkan kerugian dari tindakan pajak agresif diantaranya adalah :

1. Kemungkinan perusahaan mendapatkan sanksi/penalti dari fiskus pajak, dan turunnya harga saham perusahaan (Sari dan Martani, 2010).
2. Rusaknya reputasi perusahaan akibat audit dari fiskus pajak.
3. Penurunan harga saham dikarenakan pemegang saham lainnya mengetahui tindakan pajak agresif yang dijalankan manajer dilakukan dalam rangka *rent extraction* (Desai dan Dharmapala, 2006).

2.1.4 Kepemilikan Keluarga

Indonesia merupakan salah satu Negara berkembang yang masih memiliki dominan kepemilikan saham oleh keluarga diperusahaan. Kepemilikan saham di negara berkembang sebagian besar dikontrol oleh kepemilikan keluarga, termasuk perusahaan di Indonesia (Arifin, 2003). Menurut Leino (2009) perusahaan keluarga mempunyai peran yang penting untuk ekonomi baik lokal ataupun regional karena dapat memberikan kestabilan ekonomi yang permanen. Selain itu, Fama dan Jensen (1983) menyatakan bahwa perusahaan dengan kepemilikan

keluarga lebih efisien daripada perusahaan yang dimiliki publik karena biaya pengawasan yang dikeluarkan atau *monitoring cost* nya lebih kecil. Sedangkan Maury (2006) berpendapat bahwa dengan adanya kepemilikan keluarga di suatu perusahaan maka perusahaan tersebut dapat meningkatkan profitabilitas di dalam perusahaan tersebut bila dibandingkan dengan perusahaan yang dikendalikan oleh pemilik non-keluarga.

Sebuah bisnis keluarga dikelompokkan sebagai bisnis keluarga jika orang-orang yang terlibat dalam bisnis sebagian besar masih terikat dalam garis keluarga. Dalam sebuah usaha keluarga, anggota keluarga secara ekonomis tergantung pada yang lain, dan bisnisnya secara strategis dihubungkan pada kualitas hubungan keluarga. Itu juga menggabungkan sebuah rentang situasi mulai dari perusahaan keluarga generasi tunggal suami dan istri, anak, dan keponakan (Susanto et al, 2007).

Sedangkan menurut (Hoover, 2000), dalam sebuah usaha keluarga, maka kekuatan utama dalam bisnis keluarga adalah kekuatan hubungan kekerabatan dan didukung komunikasi yang baik untuk menjalankan bisnis keluarga. Suatu organisasi dinamakan perusahaan keluarga apabila paling sedikit ada keterlibatan dua generasi dalam keluarga itu dan mereka mempengaruhi kebijakan perusahaan (Susanto et al, 2007).

Dalam beberapa tahun terakhir, banyak definisi perusahaan keluarga disampaikan, kebanyakan dari usulan definisi itu berfokus pada beberapa faktor yang melingkupi perusahaan keluarga seperti kepemilikan, kendali, manajemen dan keinginan untuk melestarikan suksesi antar generasi atau masalah-masalah

budaya. Banyak peneliti sependapat bahwa keterlibatan keluarga dalam perusahaan lah yang membuat perusahaan keluarga menjadi berbeda dibanding dengan perusahaan non keluarga (Miller dan Rice, 1967). Pendapat senada juga dikemukakan oleh Bernard (1975: 42) bahwa perusahaan keluarga dikendalikan oleh anggota keluarga tunggal khususnya dalam proses pengambilan keputusan bisnis yang penting.

Beberapa peneliti mengintepreatsikan keterlibatan keluarga dalam hal kepemilikan dan manajemen (Handler, 1989). Sementara itu Churchill dan Hatten (1987) lebih cenderung menambahkan faktor keberadaan keluarga pada saat terjadinya suksesi yang berasal dari dalam anggota keluarga itu sendiri. Lebih lanjut Carsrud (1994: 40) menjelaskan bahwa perusahaan keluarga adalah perusahaan yang benar-benar dimiliki oleh keluarga dan pembuatan dan pengambilan kebijakan perusahaan di dominasi oleh anggota “*emotional kinship group*”. Ini berarti bahwa sesuatu perusahaan keluarga manakala dominasi anggota keluarga yang termasuk dalam kelompok yang mempunyai pertalian keluarga secara emosional sangat besar dan kelihatan secara kasat mata.

Prasetyo (2009), menemukan bahwa perusahaan publik di Indonesia, perusahaan yang dikendalikan keluarga, perusahaan negara, atau perusahaan yang dikendalikan institusional, memiliki masalah agensi yang lebih kecil daripada perusahaan yang dikendalikan publik atau perusahaan tanpa pemegang saham pengendali. Perusahaan yang dikendalikan keluarga memiliki masalah agensi yang lebih sedikit karena terdapat konflik yang lebih sedikit antara prinsipal dan agen, tetapi terdapat masalah agensi lain yaitu antara pemegang saham mayoritas

dengan pemegang saham minoritas. Menurut Lei dan Song (2007), perusahaan yang mempunyai kepemilikan keluarga atau salah satu anggota keluarganya menduduki dewan direksi maka memiliki corporate governance index yang buruk, hal ini disebabkan adanya keinginan dari anggota dewan direksi yang memiliki kepemilikan keluarga untuk lebih memperhatikan kepentingannya sendiri.

Penelitian ini menggunakan definisi keluarga yang digunakan oleh Arifin (2003), yaitu semua individu dan perusahaan yang kepemilikannya tercatat (kepemilikan > 5% wajib dicatat). Yang bukan perusahaan publik, negara institusi keuangan, dan publik (individu yang kepemilikannya tidak wajib dicatat). Dalam penelitian ini kepemilikan keluarga dihitung dari kepemilikan individu anggota keluarga (non direksi dan komisaris), non perusahaan publik, non BUMN, non institusi keuangan, perusahaan afiliasi, dan perusahaan asing yang merupakan kepanjangan tangan dari perusahaan tersebut.

2.1.5 Corporate Governance

Corporate governance atau yang dikenal dengan tata kelola sebuah perusahaan muncul karena adanya pemisahan antara kepemilikan dan pengelola perusahaan yang dapat menimbulkan *agency problem*. *Agency problem* adalah konflik yang terjadi akibat adanya perbedaan kepentingan antara manajer dengan pemilik perusahaan. Sehingga memerlukan sistem pemantauan serta pengawasan yang dikenal dengan istilah tata kelola perusahaan (*corporate governance*).

Saat ini pemahaman mengenai tata kelola perusahaan telah banyak berkembang, baik secara teoritis maupun empiris. Hal ini disebabkan peran penting dari sebuah tata kelola perusahaan yang telah membuktikan

keberhasilannya dalam menghadapi kondisi ekonomi yang tidak menentu. Selain itu tata kelola perusahaan yang baik juga merupakan salah satu faktor yang diperhatikan oleh para investor untuk mempertimbangkan apakah akan melakukan investasi atau tidak. Dapat juga dikatakan bahwa pemahaman mengenai sebuah tata kelola perusahaan merupakan tuntutan terhadap pengelola perusahaan agar tata kelola perusahaan menjadi lebih baik.

2.1.6 Pengertian *Corporate Governance*

Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) menyatakan bahwa *corporate governance* adalah suatu struktur hubungan yang memiliki keterkaitan dengan tanggung jawab diantara pihak-pihak terkait yang terdiri dari pemegang saham, anggota dewan direksi dan komisaris termasuk manajer yang dibentuk untuk mendorong terciptanya suatu kinerja yang kompetitif yang diperlukan dalam mencapai tujuan utama suatu perusahaan. Sedangkan menurut *The Indonesian Institute for Corporate Governance (IICG)*, *corporate governance* adalah proses dan struktur yang diterapkan dalam menjalankan perusahaan dengan tujuan utama untuk meningkatkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholders* lainnya.

Menurut Shaw (2003), *corporate governance* adalah suatu proses pengambilan keputusan dalam kondisi yang pasti ataupun belum pasti dimana peran penting dari *corporate governance* adalah untuk mengetahui serta memonitor risiko yang akan risiko datang. Sedangkan menurut Kim, Nofsinger, dan Mohr (2010), *corporate governance* adalah suatu sistem pengawasan dan

penyeimbang yang terintegrasi serta rumit yang dilibatkan untuk mencegah serta mengatasi timbulnya konflik yang dapat menyebabkan *agency problem* dimana pihak yang melakukan pemantauan dapat dibedakan menjadi pihak-pihak dari dalam struktur perusahaan, pihak yang berasal dari luar perusahaan dan berasal dari pemerintah.

Monks (2003) mendefinisikan *corporate governance* sebagai suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan yang dapat menciptakan nilai tambah untuk semua stakeholder di perusahaan tersebut. Sedangkan menurut *Forum for Corporate governance in Indonesia* (FCGI, 2001) *corporate governance* sebagai suatu perangkat peraturan yang menetapkan hubungan antara pemegang saham, pengurus, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya sehubungan dengan hak-hak dan kewajiban mereka. Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG, 2004) menyatakan bahwa *corporate governance* merupakan suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ perusahaan untuk memberikan nilai tambah pada perusahaan secara berkesinambungan dalam jangka panjang bagi pemegang saham, dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholders* lainnya, berlandaskan peraturan perundang-undangan dan norma yang berlaku. Berdasarkan definisi-definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa *corporate governance* adalah seperangkat peraturan yang mengatur hubungan diantara berbagai pihak dalam perusahaan sehubungan dengan hak-hak dan kewajiban mereka dengan tujuan mencapai kepentingan pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan semua pihak.

Corporate governance muncul karena terjadi pemisahan kepentingan antara kepemilikan dan pengendalian perusahaan yang sering disebut sebagai masalah keagenan. Permasalahan yang dihadapi oleh para pemegang saham adalah bagaimana mereka dapat memastikan bahwa dana yang telah mereka investasikan dalam perusahaan akan digunakan secara tepat oleh manajer dan tidak digunakan untuk proyek yang tidak menguntungkan sehingga akan menghasilkan keuntungan seperti yang mereka harapkan. Ujiyantho dan Pramuka, (2007) menyatakan bahwa *corporate governance* diperlukan untuk mengurangi permasalahan keagenan yang terjadi di antara pemilik dan manajer.

2.1.7 Prinsip-prinsip *Corporate Governance*

Dalam *corporate governance* terdapat beberapa prinsip, dan prinsip-prinsip *corporate governance* ini dipastikan dapat diterapkan pada setiap aspek bisnis dan di semua jajaran perusahaan. Warsono, dkk (2010) menyatakan bahwa terdapat 5 prinsip dasar *corporate governance* yaitu *Transparency, Accountability and Responsibility, Independency, dan Fairness*.

1. *Transparency* (transparasi)

Dalam menjalankan fungsinya, semua partisipan dalam perusahaan harus menyampaikan informasi yang material sesuai dengan substansi yang sesungguhnya, dan menjadikan informasi tersebut dapat diakses dan dipahami secara mudah oleh pihak-pihak lain yang berkepentingan.

2. *Accountability and Responsibility* (Akuntabilitas dan Pertanggungjawaban)

- a. *Accountability* (Akuntabilitas) yaitu, kejelasan fungsi, struktur, sistem, dan pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif.
- b. *Responsibility* (Pertanggungjawaban) yaitu, kesesuaian (kepatuhan) didalam pengelolaan perusahaan terhadap prinsip korporasi yang sehat serta peraturan perundangan yang berlaku.

3. *Independency* (independensi)

Dalam menjalankan fungsinya, setiap partisipan dalam perusahaan harus membebaskan diri dari kepentingan pihak-pihak lain yang berpotensi memunculkan konflik kepentingan, dan menjalankan fungsinya sesuai kompetensi yang memadai.

4. *Fairness* (keadilan)

Dalam menjalankan fungsinya, setiap partisipan dalam perusahaan harus memperlakukan pihak lain secara adil berdasarkan ketentuan-ketentuan yang berterima umum.

Prinsip-prinsip dasar *good corporate governance* yang dikeluarkan OECD (*Organization for Economic Cooperation and Development*) menyatakan bahwa kerangka kerja *corporate governance* seharusnya:

1. Melindungi hak pemegang saham,
2. Memperlakukan seluruh pemegang saham dengan sama,
3. Mengakui hak-hak *stakeholder* sesuai dengan hukum yang berlaku dan menerapkan konsep *corporate* yang baik, mengungkapkan seluruh hal

yang material perusahaan dengan akurat dan tepat waktu, termasuk kondisi keuangan, kinerja, kepemilikan dan tata kelola perusahaan; serta

4. Memastikan panduan strategik perusahaan, pengawasan manajemen oleh dewan yang efektif dan pertanggung-jawaban dewan kepada perusahaan dan pemegang saham.

Menurut Prasetyo (2009), prinsip-prinsip dasar *good corporate governance* ini diharapkan menjadi titik rujukan bagi para regulator (pemerintah) dalam membangun *framework* bagi penerapan *good corporate governance*. Bagi para pelaku usaha dan pasar modal prinsip-prinsip ini dapat menjadi *guidance* atau pedoman dalam mengolaborasi *best practices* bagi peningkatan nilai dan kelangsungan hidup perusahaan.

2.1.8 Manfaat *Corporate Governance*

Manfaat dari pelaksanaan *good corporate governance* menurut *forum for Corporate Governance in Indonesia* (FCGI), (2001):

1. Meningkatkan kinerja perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih baik, dan meningkatkan efisiensi operasional perusahaan serta lebih meningkatkan pelayanan yang lebih baik kepada *stakeholders*.
2. Mempermudah dalam memperoleh dana pembiayaan yang lebih murah sehingga dapat lebih meningkatkan *corporate value*.
3. Mengembalikan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya di perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia.

4. Pemegang saham akan merasa puas dengan kinerja perusahaan karena sekaligus akan meningkatkan *shareholders value* dan dividen.

Sedangkan menurut *Indonesian Institute for Corporate Governance (IICG)*, (2000), keuntungan yang bisa diambil oleh perusahaan apabila menerapkan konsep *good corporate governance* adalah:

1. Meminimalkan *agency cost*.

Selama ini para pemegang saham harus menanggung biaya yang timbul akibat dari pendelegasian wewenang kepada manajemen. Biaya-biaya ini bisa berupa kerugian karena manajemen menggunakan sumber daya perusahaan untuk kepentingan pribadi maupun berupa biaya pengawasan yang harus dikeluarkan perusahaan agar mencegah manajemen untuk melakukan tindakan yang dapat merugikan pemegang saham sehingga biaya ataupun kerugian akibat dari manajemen dapat berkurang.

2. Meminimalkan *cost of capital*

Perusahaan yang baik dan sehat akan menciptakan suatu referensi positif bagi para kreditur. Kondisi ini sangat berperan dalam meminimalkan biaya modal yang harus ditanggung bila perusahaan akan mengajukan pinjaman, Dengan kemudahan dalam mendapatkan modal maka perusahaan dapat menciptakan barang-barang atau produk yang berkualitas serta kompetitif.

3. Meningkatkan nilai saham perusahaan

Suatu perusahaan yang dikelola secara baik dan dalam kondisi sehat akan menarik minat investor untuk menanamkan modalnya. Adanya penanaman modal yang besar oleh para investor akan menghasilkan peningkatan pada

nilai saham perusahaan.

4. Mengangkat citra perusahaan

Citra perusahaan merupakan faktor penting yang sangat erat kaitannya dengan kinerja dan keberadaan perusahaan tersebut dimata masyarakat dan khususnya para investor. Citra (*image*) suatu perusahaan kadangkala akan menelan biaya yang sangat besar dibandingkan dengan keuntungan perusahaan itu sendiri, guna memperbaiki citra tersebut. *Corporate governance* dapat meningkatkan citra perusahaan karena dengan tata kelola perusahaan yang baik akan memperlihatkan bahwa operasi perusahaan tersebut dilakukan dengan baik dan sesuai dengan aturannya. Hasil yang akan didapatkan adalah kinerja perusahaan yang baik sehingga masyarakat menilai bahwa perusahaan tersebut baik karena memiliki *good corporate governance*.

2.1.9 Variabel Kontrol

Untuk mengontrol kemungkinan adanya pengaruh dari profitabilitas dan *leverage* perusahaan, maka penelitian ini memasukkan variabel kontrol *return on assets (ROA)* dan *leverage (LEV)* kedalam model regresi yang diuji. Variabel *PPE* juga dikontrol karena adanya metode penyusutan untuk pelaporan komersil dan fiskal (Manzon dan Plesko 2002). Menurut Richardson dan Lanis (2007), semakin besar perusahaan maka akan semakin rendah *ETR* yang dimilikinya, hal ini disebabkan perusahaan mampu menggunakan sumber daya yang dimilikinya untuk membuat suatu perencanaan pajak yang baik. Namun perusahaan tidak selalu dapat menggunakan *power* yang dimilikinya untuk melakukan perencanaan

pajak, karena adanya batasan berupa kemungkinan menjadi sorotan dan sasaran dari keputusan regulator, oleh karena itu ukuran perusahaan (*SIZE*) dikontrol (Watts dan Zimmerman 1986).

Di sisi lain, tingkat pertumbuhan usaha perusahaan (diproksikan dengan *market-to-book ratio – MB*) juga dikontrol karena Manzon dan Plesko (2002) menyatakan bahwa perusahaan yang sedang mengalami pertumbuhan akan lebih suka melakukan investasi pada *tax-favored assets*. Perusahaan yang sedang mengalami pertumbuhan dapat leluasa memilih jenis investasinya, namun tidak demikian dengan perusahaan yang dananya terbatas. Dan untuk menghindari adanya pengaruh dari kondisi bisnis terhadap kecenderungan perilaku investasi yang dilakukan perusahaan, penelitian ini mengontrol *lagged book-tax difference* (nilai *book-tax difference* tahun $t-1$)

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian yang pernah dilakukan oleh Chen et al. (2010) yang menguji tentang perusahaan keluarga lebih cenderung melakukan tindakan pajak agresif. Data penelitian ini adalah 1.003 perusahaan dalam indeks S & P 1500 (S & P 500, S & P Mid Cap 400, dan S & P 600 indeks Small Cap) untuk periode 1996-2000. Hasil penelitian tersebut adalah tidak signifikan secara statistik.

Dewi dan Dwi (2010) juga meneliti tentang karakteristik kepemilikan perusahaan, *corporate governance* terhadap tindakan pajak agresif. Sampel dari penelitian ini adalah perusahaan publik yang terdaftar dalam direktori ICMD (*Indonesian Capital Market Directory*).

Hanlon dan Slemrod (2009) meneliti praktek corporate governance dalam perusahaan dan harga saham yang berpengaruh dengan tindakan pajak yang dilakukan perusahaan tersebut. Sampel dari penelitian ini diperoleh dari artikel 1990-2004 yang diperoleh dari sumber di Factiva yang database. Penelitian Desai dan Dharmapala (2007) juga meneliti tentang pajak dan tata kelola perusahaan, hasil dari penelitian tersebut adalah signifikan.

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Chen et al (2010)	<i>Are family firms more or less tax aggressive?</i>	Hubungan antara perusahaan keluarga dan pajak agresif mempunyai hasil yang tidak signifikan.
2.	Sari, D.K. dan Martani, D (2010)	Karakteristik Kepemilikan Perusahaan, <i>Corporate Governance</i> , dan Tindakan Pajak Agresif	Perusahaan keluarga dan <i>corporate governance</i> terhadap tindakan pajak agresif berpengaruh negatif dan hasilnya tidak signifikan.
3.	Harlon, M. dan Slemrod, J (2009)	<i>What does tax aggressiveness signal? Evidence from stock price reactions to news about tax shelter</i>	Harga saham dan tindakan pajak agresif perusahaan mempunyai hasil yang signifikan secara statistik.

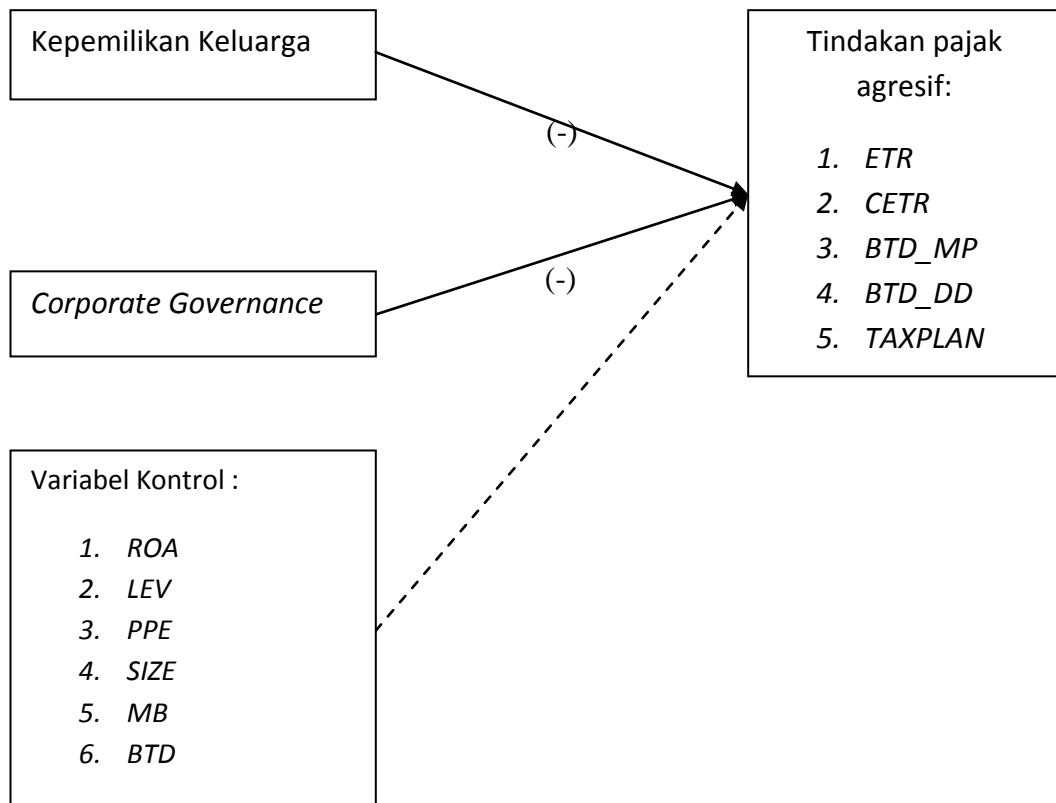
involvement.

4. Desai dan Dharmapala (2007) *Taxation and Corporate Governance: An Economic Approach.* Hubungan antara sistem pajak dan tata kelola perusahaan memiliki hasil yang signifikan.

2.3 Kerangka Pemikiran

Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran Teoritis



2.4 Pengembangan Hipotesis

Pada penelitian ini, peneliti mengajukan tiga hipotesis. Hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut :

2.4.1 Kepemilikan Keluarga terhadap Tindakan Pajak Agresif

Untuk menentukan apakah tindakan pajak agresif pada perusahaan keluarga lebih rendah atau lebih tinggi daripada perusahaan non-keluarga, tergantung dari seberapa besar keuntungan atau kerugian yang ditanggung pihak keluarga yang menjadi manajemen perusahaan (*family owners*) atau pihak manajer dalam perusahaan non-keluarga. Tindakan pajak agresif memiliki lima komponen pengukuran yaitu *effective tax rate (ETR)*, *cash effective tax rate (CETR)*, *book-tax difference Manzon-Plesko (BTD_MP)*, *book-tax difference Desai-Dharmapala (BTD_DD)* dan *tax planning (TAXPLAN)* menurut Sari dan Martani (2009). *Family owners* memiliki kepemilikan yang lebih besar, rentang waktu investasi yang lebih lama, serta memiliki kepedulian yang lebih tinggi terhadap reputasi perusahaan. Oleh karenanya Chen et al. (2010) menyatakan bahwa manfaat dan biaya dari tindakan pajak yang agresif akan lebih tinggi dirasakan oleh perusahaan keluarga. Konflik yang ada didalam perusahaan keluarga juga lebih kecil dibanding perusahaan non keluarga. Pemilik saham minoritas biasanya tidak mempunyai hak untuk mengambil keputusan dan akan menerima keputusan yang diberikan oleh pemilik saham mayoritas. Sehingga

pemilik saham minoritas akan lebih taat terhadap keputusan yang dibuat oleh pemilik saham mayoritas (Arifin, 2003).

Penelitian Chen et al. (2010) yang dilakukan untuk mengetahui apakah perusahaan keluarga lebih agresif dalam tindakan pajaknya daripada perusahaan non-keluarga, menunjukkan bahwa pada perusahaan-perusahaan yang termasuk dalam S&P 1500 Index (periode 1996-2000), perusahaan keluarga memiliki tingkat keagresifan pajak yang lebih kecil daripada perusahaan non-keluarga. Hal ini diduga terjadi karena dibandingkan perusahaan non-keluarga, *family owners* lebih rela membayar pajak lebih tinggi, daripada harus membayar denda pajak dan menghadapi kemungkinan rusaknya reputasi perusahaan akibat audit dari fiskus pajak. Fiskus pajak yaitu petugas pemeriksa pajak. Dengan adanya denda dan kemungkinan rusaknya reputasi perusahaan akibat tindakan pajak agresif tersebut, *family owner* akan mempertimbangkan apakah akan melakukan tindakan pajak agresif atau tidak.

Mengacu pada penelitian Chen et al. (2010), maka hipotesis penelitian pertama dirumuskan dalam format hipotesis alternatif sebagai berikut:

H1 : Kepemilikan keluarga berpengaruh negatif terhadap tindakan pajak agresif.

2.4.2 Corporate Governance terhadap Tindakan Pajak Agresif

Penelitian yang dilakukan oleh Desai dan Dharmapala (2006) adalah salah satu contoh penelitian empiris yang memperlihatkan pengaruh *corporate governance* terhadap pajak. Desai dan Dharmapala (2006) dengan menggunakan data perusahaan yang terdapat dalam S&P Compustat database (periode 1993-

2001), telah meneliti pengaruh praktik *corporate governance* terhadap hubungan antara kompensasi/insentif manajemen dengan tindakan penghindaran pajak.

Di tingkat internasional, interaksi antara *corporate governance* dan pajak sudah mulai diobservasi. Diketahui dari Schon (2008), peraturan *corporate governance* telah dijadikan alat oleh pemerintah untuk memerangi usaha penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan.

Friese et al. (2008) menyatakan bahwa pajak dan *corporate governance* dapat berinteraksi dalam berbagai aspek, dan interaksi ini dapat bersifat satu atau dua arah. Di Indonesia, contoh peraturan perpajakan yang dapat mempengaruhi *governance* perusahaan adalah Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 43/PMK.03/2008 (DJP – 2008). Peraturan tersebut menyatakan bahwa Wajib Pajak (WP) dapat menggunakan nilai buku dalam pemekaran usaha jika WP atau badan usaha hasil pemekaran tersebut akan melakukan penawaran umum perdana. Dari peraturan ini terlihat adanya dorongan dari pemerintah bagi perusahaan untuk melakukan transparansi lebih dengan cara menjadi perusahaan public. Sedangkan contoh prinsip *corporate governance* yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan perpajakan perusahaan adalah prinsip keterbukaan dan transparansi.

Dengan adanya ketebukaan informasi, maka diharapkan perusahaan akan cenderung mengambil tindakan perpajakan yang tidak berisiko. Prinsip keterbukaan dan transparansi informasi tersebut juga bisa mengurangi masalah yang timbul antara pemilik perusahaan dan manajer. Dengan menerapkan prinsip-prinsip *corporate governance*, perusahaan bisa memiliki *good corporate*

governance. Perusahaan dengan *corporate governance* yang tinggi akan lebih taat terhadap peraturan yang telah ditentukan dan lebih jarang melakukan tindakan pajak agresif. Tindakan pajak agresif dalam penelitian ini memiliki lima komponen pengukuran yaitu *effective tax rate (ETR)*, *cash effective tax rate (CETR)*, *book-tax difference Manzon-Plesko (BTD_MP)*, *book-tax difference Desai-Dharmapala (BTD_DD)* dan *tax planning (TAXPLAN)* menurut Sari dan Martani (2009). Dengan adanya good corporate governance masyarakat bisa menilai apakah perusahaan tersebut taat dalam pembayaran pajak atau tidak, dan apakah perusahaan tersebut juga melakukan penyimpangan pajak atau tidak. Hasil yang akan didapatkan adalah kinerja perusahaan yang baik sehingga masyarakat menilai bahwa perusahaan tersebut baik

Oleh karenanya dalam penelitian ini diajukan hipotesis kedua dalam bentuk alternative sebagai berikut :

H2 : *Corporate governance* berpengaruh negatif terhadap tindakan pajak agresif perusahaan pada pengukuran.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

Analisis data pada penelitian ini menggunakan variabel-variabel yang terdiri dari variabel terikat (*dependent variable*) variabel bebas (*independent variabel*) dan variabel kontrol. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah tindakan pajak agresif. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah kepemilikan keluarga dan *corporate governance*. Sedangkan variabel kontrol dalam penelitian ini adalah *ROA, LEV, PPE, SIZE, MB, BTD*.

3.1.1 Variabel Dependen

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah tindakan pajak agresif. Penelitian ini mendefinisikan tindakan pajak agresif adalah suatu tindakan yang ditujukan untuk menurunkan laba kena pajak melalui perencanaan pajak baik menggunakan cara yang tergolong atau tidak tergolong *tax evasion* (Sari dan Martani. 2009).

Penelitian ini menggunakan lima ukuran dalam mengukur tingkat tindakan pajak agresif, yaitu *effective tax rate (ETR)* yang digunakan untuk merefleksikan perbedaan antara perhitungan laba buku dengan laba fiskal (Frank et al. 2009),

cash effective tax rate (CETR) digunakan untuk mengidentifikasi keagresifan perencanaan pajak yang dilakukan, *book-tax difference Manzon-Plesko (BTD_MP)* dan *book-tax difference Desai-Dharmapala (BTD_DD)* digunakan untuk mendapatkan trigulasi, menurut Desai dan Dharmapala (2006) *book-tax difference* bisa timbul karena adanya aktivitas perencanaan pajak dan manajemen laba, maka nilai residu dari regresi nilai *book-tax difference* dan nilai total akrual diharapkan murni merupakan cerminan dari aktivitas perencanaan pajak. Sedangkan *TAXPLAN* digunakan untuk menggambarkan tingkat subsidi pajak yang digunakan (Yin dan Cheng 2004). Rumus dari ke lima pengukuran tersebut adalah sebagai berikut:

1. ETR_{it}

$$ETR_{it} = \frac{\text{Total Tax Expense}_{it}}{\text{Pre-tax income}_{it}}$$

2. $CETR_{it}$

$$CETR_{it} = \frac{\text{Cash Tax Paid}_{it}}{\text{Pre-tax income}_{it}}$$

3. BTD_MP_{it}

$$BTD_{MPit} = \frac{Y_{it}^S - Y_{it}^T}{\text{Total Asset}_{it-1}}$$

4. BTD_DD_{it}

$$BTD_{DDit} = \beta_1 TA_{it} + \mu_i + \varepsilon_{it}$$

5. $TAXPLAN_{it}$

$$TAXPLAN_{it} = \frac{\sum_t^{t-2} [PTI * 28\% - \text{Current portion of total tax expense}]:3}{\text{Ending Asset}_t}$$

3.1.2 Variabel Independen

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah kepemilikan keluarga dan *corporate governance*.

3.1.2.1 Kepemilikan Keluarga

Arifin (2003) menyatakan bahwa semua individu dan perusahaan yang kepemilikannya tercatat (kepemilikan > 5% wajib dicatat), keluarga adalah seseorang yang berhubungan darah atau karena pernikahan. Dalam penelitian ini kepemilikan keluarga diukur dengan menggunakan variabel dummy yaitu nilai 1 jika proporsi kepemilikan keluarga > 50%, dan bernilai 0 jika sebaliknya.

3.1.2.2 Corporate Governance

Forum for Corporate governance in Indonesia (FCGI,2001) mendefinisikan *corporate governance* sebagai suatu perangkat peraturan yang menetapkan hubungan antara pemegang saham, pengurus, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya sehubungan dengan hak-hak dan kewajiban mereka. Dalam penelitian ini *corporate governance* diukur dengan menggunakan variabel dummy yaitu nilai 1 jika nilai indeks CG \geq 60% dan 0 jika nilai indeks CG < 60% (Sari dan Martani, 2009).

3.1.3 Variabel Kontrol

Variabel kontrol adalah variabel yang dikendalikan sehingga pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat tidak dipengaruhi oleh faktor luar yang

tidak diteliti. Penelitian ini menggunakan delapan variabel kontrol untuk mengendalikan faktor-faktor lain yang mempengaruhi terjadinya tindakan pajak agresif. Variabel kontrol yang digunakan adalah ROA_{it} , LEV_{it} , PPE_{it} , $SIZE_{it}$, MB_{it} , BTD_{it} .

1. ROA_{it} adalah Return on Assets untuk perusahaan i , tahun t . Diukur dengan membagi operating income dengan total aset ($t-1$).
2. LEV_{it} adalah *Leverage* untuk perusahaan i , tahun t , diukur dengan membagi *long-term debt* dengan total aset ($t-1$).
3. PPE_{it} adalah Nilai *property, plant, dan equipment* untuk perusahaan i , tahun t , dibagi dengan nilai total aset ($t-1$).
4. $SIZE_{it}$ adalah Nilai natural logaritma *market value of equity* untuk perusahaan i , pada awal tahun t .
5. MB_{it} adalah *Market-to-book ratio* untuk perusahaan i , pada awal tahun t , diukur dengan cara membagi *market value of equity* dengan *book value of equity*.
6. BTD_{it} adalah *Book-tax difference*, untuk perusahaan i , tahun $t-1$.

3.2 Populasi dan Sampel

Populasi yang digunakan pada penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia (BEI). Sampel merupakan bagian dari populasi yang dapat mewakili karakteristiknya (Indriantoro dan Supomo, 1999). Penentuan sampel ini dengan menggunakan *purposive sampling*, yaitu sampel yang memiliki kesesuaian karakteristik sampel dengan kriteria pemilihan sampel yang telah ditentukan. Kriteria tersebut adalah:

1. Perusahaan manufaktur yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia tahun 2008-2011.
2. Perusahaan dengan data keuangan yang lengkap, atau perusahaan yang pada tahun dimaksud melakukan aktivitas.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder. Data sekunder adalah data yang telah diolah pihak lain. Data tersebut diperoleh dari lembaga atau instansi melalui pengutipan data atau melalui studi pustaka yang ada kaitannya dengan penelitian ini. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang terdiri dari:

1. Data kepemilikan perusahaan dan data keuangan perusahaan dari laporan keuangan perusahaan yang diperoleh dari *website* Bursa Efek Indonesia www.idx.co.id tahun 2008-2011, dan
2. Data indeks *corporate governance* yang diperoleh dari IICD (*Indonesian Institute for Corporate Directorship*).
3. Data yang berhubungan dengan variabel kontrol diperoleh dari laporan keuangan perusahaan tahun 2008-2011.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pengumpulan data dokumenter. pengumpulan data dokumenter dilakukan dengan kategori dan klasifikasi data-data tertulis yang berhubungan dengan masalah penelitian, baik dari sumber dokumen, buku, koran, majalah, dan sebagainya.

Metode dokumenter adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan mempelajari catatan-catatan atau dokumentasi perusahaan sesuai dengan data yang diperlukan. Dari data perusahaan yang dikumpulkan dan memenuhi kriteria selama periode pengamatan akan digabungkan dan dijadikan sample penelitian. Keunggulan metode pengumpulan data dengan cara menggabungkan data- data perusahaan ini adalah kemungkinan diperolehnya jumlah sampel yang lebih besar yang diharapkan lebih meningkatkan *power of test* dari penelitian ini.

3.5 Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis yaitu analisis regresi, dan analisis deskriptif. Analisis tersebut bertujuan untuk menguji hubungan antara variable dependen dan variabel independen dari penelitian ini.

3.5.1 Analisis Regresi

Suatu penelitian membutuhkan analisis data dan interpretasinya yang bertujuan menjawab pertanyaan- pertanyaan yang ada dalam mengungkap fenomena tertentu. Analisis data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan di interpretasikan. Maka digunakan persamaan umum regresi yang bertujuan untuk menguji hipotesis-hipotesis penelitian.berikut adalah persamaan umum regresi yang diuji :

$$TaxAgg_{it} = \alpha + \beta_1 FAMILY_{it} + \beta_2 CG_i + \beta_3 ROA_{it} + \beta_4 LEV_{it} + \beta_5 PPE_{it} \\ + \beta_6 SIZE_{it-1} + \beta_7 MB_{it-1} + \beta_8 BTD_{it-1} + \varepsilon_i + \mu_{it}$$

Dimana :

$TaxAgg_{it}$ = Diukur dengan menggunakan ETR_{it} , $CETR_{it}$, $book-tax$

difference (BTD_MP_{it}), *residual book-tax difference* (BTD_DD_{it}), dan rata-rata tingkat perencanaan pajak perusahaan ($TAXPLAN_{it}$).

$FAMILY_{it}$ = Merupakan *dummy variable*, bernilai 1 jika proporsi kepemilikan keluarga > 50%, dan bernilai 0 jika sebaliknya.

CG_{it} = Merupakan *dummy variable*, dimana nilainya 1 jika nilai indeks CG > 0,6 dan 0 jika sebaliknya.

ROA_{it} = *Return on assets* untuk perusahaan i , tahun t , diukur dengan membagi *operating income* dengan total aset ($t-1$).

LEV_{it} = *Leverage* untuk perusahaan i , tahun t , diukur dengan membagi *long-term debt* dengan total aset ($t-1$).

PPE_{it} = Nilai *property, plant, dan equipment* untuk perusahaan i , tahun t , dibagi dengan nilai total aset ($t-1$).

$SIZE_{it}$ = Nilai natural logaritma *market value of equity* untuk perusahaan i , pada awal tahun t .

MB_{it} = *Market-to-book ratio* untuk perusahaan i , pada awal tahun t , diukur dengan cara membagi *market value of equity* dengan *book value of equity*.

BTD_{it} = *Book-tax difference*, untuk perusahaan i , tahun $t-1$.

ε_{it} = Nilai error untuk tiap individual.

u_{it} = Nilai error yang dikarenakan data berasal dari banyak individu dan banyak waktu.

3.5.2 Uji Asumsi Klasik

Pendugaan nilai koefisien regresi dengan metode kuadrat terkecil bertujuan untuk mencapai kondisi yang baik yaitu *best linier unbiased estimative* (BLUE). Agar menjadi parameter yang baik maka persamaan regresi harus memenuhi asumsi klasik. Parameter yang baik adalah parameter yang tidak bias, efisien dan konsisten. Jika terdapat penyimpangan asumsi klasik atas model linier yang diusulkan (negatif) maka hasil estimasi tidak dapat dipertanggungjawabkan. Untuk mendeteksi adanya penyimpangan asumsi klasik maka dilakukan uji normalitas, uji multikolonieritas, uji autokorelasi, dan uji heteroskedastisitas (Ghozali, 2009).

3.5.2.1 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal (ghozali, 2009).

Menurut (Santoso, 2004:212), Uji normalitas data menggunakan *Kolmogorov-Smirnov Test*, dengan membandingkan *Asymptotic Significance* dengan $\alpha = 5\%$. Dasar penarikan kesimpulan adalah data dikatakan berdistribusi normal apabila nilai *Asymptotic Significance* $> 0,05$.

3.5.2.2 Uji Multikolonieritas

Uji multikolonieritas dilakukan dengan menggunakan korelasi antara variable-variabel independent yang akan digunakan dalam persamaan regresi. Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independent. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antar variabel independent. Jika variabel-variabel independent saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak ortogonal. Variabel ortogonal adalah variabel bebas yang nilai korelasi antar sesama variabel bebas adalah nol (Ghozali : 2001).

Menurut Imam Ghozali (2001), untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolonieritas di dalam model regresi adalah sebagai berikut:

1. Nilai R² yang dihasilkan oleh suatu estimasi model regresi empiris sangat tinggi, tetapi secara individu variabel-variabel bebas banyak yang tidak signifikan mempengaruhi variabel terikat.
2. Menganalisis matrik korelasi variabel-variabel bebas. Jika antar variabel bebas ada korelasi yang cukup tinggi (diatas 0,90) maka hal ini merupakan indikasi adanya multikolonieritas.

3. Multikolinearitas dapat juga dilihat dari *tolerance* dan *Variance Inflation Factor* (VIF). Batas toleransi *tolerance* value adalah 0,10 dan VIF adalah 10. Apabila nilai *tolerance* value kurang dari 0,10 atau VIF lebih dari 10 maka terjadi multikolinearitas. Tujuan uji multikolinearitas adalah untuk mengetahui apakah tiap- tiap variabel independen saling berhubungan secara linear atau tidak.

3.5.2.3 Uji Autokorelasi

Menurut (Ghazali, 2009) uji autokorelasi bertujuan apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ sebelumnya. Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi.

3.5.2.4 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut Homoskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang Homoskedastisitas atau tidak terjadi Heteroskedastisitas (Ghazali, 2009).

3.5.3 Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif digunakan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan variabel-variabel dalam penelitian. Statistik deskriptif yang digunakan adalah ukuran tindakan pajak agresif seluruh perusahaan sampel. Gambaran variabel-variabel dapat dilihat dari rata-rata dan standar deviasi.